

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Memajukan perekonomian negara tidak lepas dari peran penting perusahaan-perusahaan yang ada di negara tersebut. Perusahaan besar baik swasta maupun milik negara memberi kontribusi besar bagi negara. Perusahaan mampu berkembang menjadi semakin besar jika mendapatkan modal yang besar serta dikelola dengan tepat. Pada awalnya, tujuan pendirian sebuah perusahaan untuk mencari laba, serta memenuhi kebutuhan *stakeholder* dalam pengembangan kegiatan perusahaan agar menjadi lebih baik.

Kegiatan bisnis perusahaan tidak hanya berdasarkan pada aspek ekonomi saja tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial. Sejak berkembangnya isu keberlanjutan perusahaan menjadi sorotan utama pada perannya terhadap lingkungan (Sulistyawati & Qadriatin, 2018). Salah satu cara agar perusahaan mendapatkan legitimasi yang kuat dalam lingkup masyarakat adalah dengan menjalin hubungan yang baik antara pemilik perusahaan dengan masyarakat sekitar. Saat ini perusahaan dituntut untuk bersikap lebih transparan terhadap aktivitas perusahaannya tidak hanya oleh pihak-pihak pemangku kepentingan seperti investor tetapi juga oleh karyawan, masyarakat dan juga pemerintah (Aisyah dan Linda, 2023).

Pembaharuan suatu daerah seringkali didorong oleh eksistensi perusahaan maupun industri yang beroperasi di lokasi tersebut (Dewi, 2019). Hal tersebut tentu dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, namun disamping itu juga dapat menimbulkan dampak negatif dikarenakan tingginya keinginan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dapat memicu kerusakan lingkungan yang nantinya berimbas pada masyarakat sekitar, salah satunya adalah polusi industri yang mengancam sumber-sumber air. Selain itu, di sepanjang tahun 2017

wahana lingkungan hidup juga mencatat sebanyak 307 konflik lingkungan dan agraria yang bersumber dari 13 provinsi di Indonesia (Rahmadi, 2018).

Kasus-kasus yang diakibatkan oleh perusahaan tersebut dideskripsikan melalui film dokumenter Indonesia berjudul “*Sexy Killer*” yang menggambarkan kesulitan masyarakat Kalimantan akibat perluasan lahan oleh perusahaan tambang maupun keberadaan perusahaan listrik tenaga uap Batang yang menyebabkan terhambatnya kegiatan petani dan nelayan sekitar. Padahal sudah terdapat undang-undang nomor 40 tahun 2007 pasal 74 yang menyatakan setiap perusahaan yang melaksanakan aktivitasnya pada aspek yang bersumber dari alam harus melakukan aktivitas yang berhubungan dengan lingkungan dan sosial (Marthin et al., 2017). Akan tetapi, terbatasnya ulasan informasi guna menafsirkan dampak dari lingkungan dan sosial tersebut menyebabkan pemerintah tidak bisa memantau sejauh mana tanggung jawab perusahaan pada keberlangsungan lingkungan dan sosial akibat aktivitasnya (Budirahardjo, 2019).

Kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk kepentingan lingkungan dan sosialnya dikenal dengan sebutan *Tripple Bottom Line*. *Tripple Bottom Line* atau 3P yaitu *profit*, *planet* dan *people*. *Profit*, mengejar keuntungan untuk kepentingan *stakeholders* dan memperhatikan kepentingan *stakeholders*. *People*, memenuhi kesejahteraan masyarakat. *Planet*, berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Tuntutan yang diberikan oleh pihak *stakeholder* kepada perusahaan untuk memberikan informasi yang bersifat transparan, organisasi yang akuntabel, serta tata kelola perusahaan yang dianggap baik maka hal ini memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai kinerja perusahaannya (Dewi & Pitriasari, 2019). Maka dari itu perusahaan diminta untuk membuat laporan di mana laporan tersebut berisi kinerja perusahaannya selama menjalankan bisnis nya dengan memperhatikan 3 aspek yaitu *planet*, *people*, dan *profit*. Laporan tersebut disebut dengan laporan berkelanjutan atau *sustainability report* (Rachmadanty dan Agustina, 2023).

Sebelum adanya *sustainability report*, ada beberapa tahapan pelaporan global yaitu pelaporan keuangan (*financial reporting*), komentar manajemen

(*management commentary*), tata kelola dan remunerasi (*governance and remuneration*) , pelaporan lingkungan (*enviromental reporting*), pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) menuju pelaporan terintegritas dalam tahun 2020 (Hifni *et al.*, 2020). Menurut *Global Reporting Initiative* (2018), *sustainability report* adalah laporan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam mengungkapkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial agar perusahaan dapat mengukur, memahami, dan mengomunikasikan kinerja perusahaan terkait *economic performance, environmental performance, dan social performance*. Menurut *Global Inititative Reporting* (2018) *sustainability report* adalah laporan tentang dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang disebabkan oleh kegiatan sehari-hari yang diterbitkan oleh perusahaan atau organisasi.

Simanjuntak dan Hutadjulu (2018) menyatakan *Sustainability report* adalah suatu pelaporan yang diungkapkan secara sukarela oleh perusahaan dan terkait dengan tiga aspek yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. *Sustainability report* disusun berdasarkan pada pedoman GRI (*Global Reporting Initiative*). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 *sustainability report* didefinisikan sebagai laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang didalamnya memuat kinerja ekonomi, keuangan, lingkungan hidup dan sosial suatu LJK, emiten dan perusahaan publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

Publikasi *sustainability report* atau laporan keberlanjutan dinilai penting karena bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kredibilitas laporan kinerja perusahaan di bidang tanggung jawab sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dimana laporan tersebut dapat diperbandingkan tahun demi tahun, dan dapat diperbandingkan dengan laporan yang dihasilkan oleh organisasi sepadan, serta kesesuaian pelaporan dengan petunjuk pelaporan yang dihasilkan oleh organisasi eksternal (ISO 26000 Klausul 7.6.2). Laporan Berkelanjutan (*sustainability report*) merupakan sebuah laporan yang terpisah dari *annual report* yang memuat tentang laporan-laporan aktivitas lingkungan dan tanggung jawab perusahaan yang dapat memberikan pembangunan jangka panjang. Laporan keberlanjutan (*sustainability report*) merupakan kinerja organisasi dalam dimensi ekonomi, sosial dan

lingkungan yang dapat menjadi media informasi bagi perusahaan untuk menginformasikan kinerja organisasi kepada seluruh pemangku kepentingan (Lili Safrida, 2023).

Beberapa *Stakeholder* menilai bahwa adanya isu mengenai hal tersebut disebabkan oleh kegiatan operasional perusahaan yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan, masyarakat, dan konsumen. Dengan adanya fakta tersebut semakin memperkuat keperluan pebisnis untuk turun tangan dan membantu dalam isu-isu sosial dan lingkungan yang terjadi di Indonesia (Amidjaya & Widagdo, 2019). Menyikapi adanya kasus tersebut, dapat dikatakan bahwa masih banyak perusahaan yang belum memahami tentang pentingnya sebuah *Sustainability report* bagi perusahaan itu sendiri. Terutama bagi perusahaan sektor LQ45 yang masih kurang memperhatikan aspek lingkungan (Nurdin Salim, 2023).

Menurut Adventy, Artha. (2024) LQ45 merupakan indeks saham yang diseleksi dari berbagai perusahaan di bursa saham dengan sejumlah kriteria. Sesuai namanya, indeks ini berisi 45 perusahaan yang sudah memenuhi kriteria seperti likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar yang baik, kondisi fundamental, prospek yang tumbuh, dan berbagai kriteria lain berdasarkan ketentuan dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Ada beberapa kriteria penting yang wajib dipenuhi agar sebuah saham bisa masuk ke dalam indeks tersebut, yakni: (1) Resmi tercatat pada BEI selama minimal 3 bulan terakhir. (2) Memiliki kondisi finansial yang sehat dengan prospek pertumbuhan yang baik. (3) Mempunyai kapitalisasi pasar yang tinggi selama kurun waktu 1-2 bulan terakhir. (4) Harus tergabung ke dalam 60 saham dengan nilai transaksi tertinggi dalam 12 bulan terakhir.

Adapun cara menghitung indeks SRDi sendiri yaitu dengan cara skor yang didapatkan oleh sebuah perusahaan dibagi dengan jumlah item menurut GRI Standard yaitu 148 item, dimana terdapat beberapa kriteria dalam penilaian tersebut. Apabila perusahaan mengungkapkan item yang terdapat di GRI Standard maka diberi nilai 1 dan apabila tidak mengungkapkan maka diberi nilai 0 (Rahman et al. 2017). Berikut ini merupakan data tabel skor dan indeks SRDi pada

perusahaan LQ45 periode Agustus 2023-Januari 2024 mengenai *sustainability report* yang terjadi pada tahun 2019-2022.

**Tabel 1.1**

***Sustainability report* Perusahaan LQ45**

| NO | KODE | TAHUN |      |      |      | RATA-RATA |
|----|------|-------|------|------|------|-----------|
|    |      | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 |           |
| 1  | ACES | 0%    | 0%   | 52%  | 43%  | 24%       |
| 2  | ADRO | 66%   | 41%  | 70%  | 37%  | 54%       |
| 3  | AKRA | 43%   | 14%  | 81%  | 30%  | 42%       |
| 4  | AMRT | 36%   | 35%  | 49%  | 53%  | 43%       |
| 5  | ANTM | 47%   | 58%  | 61%  | 45%  | 53%       |
| 6  | ARTO | 0%    | 7%   | 0%   | 0%   | 2%        |
| 7  | ASII | 37%   | 43%  | 51%  | 37%  | 42%       |
| 8  | BBCA | 26%   | 45%  | 46%  | 46%  | 41%       |
| 9  | BBNI | 41%   | 35%  | 59%  | 49%  | 46%       |
| 10 | BBRI | 35%   | 63%  | 64%  | 61%  | 56%       |
| 11 | BBTN | 43%   | 45%  | 63%  | 63%  | 54%       |
| 12 | BMRI | 41%   | 42%  | 70%  | 68%  | 55%       |
| 13 | BRIS | 42%   | 42%  | 42%  | 42%  | 42%       |
| 14 | BRPT | 34%   | 30%  | 30%  | 28%  | 31%       |
| 15 | BUKA | 0%    | 0%   | 0%   | 0%   | 0%        |
| 16 | CPIN | 0%    | 42%  | 34%  | 29%  | 26%       |
| 17 | EMTK | 0%    | 56%  | 53%  | 32%  | 35%       |
| 18 | ESSA | 0%    | 0%   | 0%   | 0%   | 0%        |
| 19 | EXCL | 34%   | 28%  | 39%  | 53%  | 39%       |
| 20 | GGRM | 0%    | 0%   | 0%   | 0%   | 0%        |
| 21 | GOTO | 0%    | 0%   | 0%   | 0%   | 0%        |
| 22 | HRUM | 0%    | 0%   | 0%   | 0%   | 0%        |
| 23 | ICBP | 0%    | 0%   | 55%  | 52%  | 27%       |
| 24 | INCO | 27%   | 57%  | 59%  | 72%  | 54%       |
| 25 | INDF | 0%    | 0%   | 58%  | 51%  | 27%       |
| 26 | INDY | 33%   | 32%  | 62%  | 75%  | 51%       |
| 27 | INKP | 79%   | 0%   | 0%   | 0%   | 20%       |
| 28 | INTP | 29%   | 40%  | 52%  | 49%  | 43%       |
| 29 | ITMG | 41%   | 59%  | 52%  | 61%  | 53%       |
| 30 | KLBF | 33%   | 26%  | 40%  | 51%  | 38%       |

|    |      |     |     |     |     |     |
|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 31 | MAPI | 0%  | 0%  | 30% | 36% | 17% |
| 32 | MDKA | 34% | 36% | 47% | 51% | 42% |
| 33 | MEDC | 33% | 33% | 33% | 31% | 33% |
| 34 | PGAS | 76% | 86% | 86% | 67% | 79% |
| 35 | PTBA | 53% | 72% | 74% | 74% | 68% |
| 36 | SCMA | 0%  | 46% | 35% | 45% | 32% |
| 37 | SIDO | 38% | 45% | 47% | 45% | 44% |
| 38 | SMGR | 26% | 49% | 61% | 50% | 47% |
| 39 | SRTG | 0%  | 26% | 26% | 0%  | 13% |
| 40 | TBIG | 27% | 27% | 46% | 46% | 37% |
| 41 | TLKM | 0%  | 44% | 49% | 45% | 35% |
| 42 | TOWR | 0%  | 0%  | 34% | 0%  | 9%  |
| 43 | TPIA | 26% | 26% | 43% | 69% | 41% |
| 44 | UNTR | 40% | 44% | 46% | 34% | 41% |
| 45 | UNVR | 37% | 43% | 50% | 51% | 45% |

Sumber data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 1.1, diketahui bahwa pada tahun 2019 terdapat 38 perusahaan yang melaporkan item *sustainability report* dibawah 43%. Pada tahun 2020 ada 29 perusahaan, tahun 2021 sebanyak 18 perusahaan melaporkan dibawah standard dan untuk tahun 2022 ada 19 perusahaan yang masih melaporkan item *sustainability report* kurang dari 43% . Apabila ditinjau secara berkesinambungan hanya ada 17 perusahaan jika di persentasekan 38% dalam rentang waktu 4 tahun dari 45 perusahaan yang sudah melaporkan item *sustainability report* lebih dari 63 item atau lebih dari 43%, dengan dimiliki sebanyak 28 perusahaan jika dipersentasekan 62% yang belum mengungkapkan item *sustainability report* secara lengkap.

Terdapat beberapa faktor yang mampu mempengaruhi terjadinya sebuah pengungkapan laporan keberlanjutan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Raihan (2023) bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *sustainability report* diantaranya adalah profitabilitas, likuiditas dan ukuran perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Zhaviratul Hanan, Mia Angelina Setiawan (2023) faktor yang mempengaruhi *sustainability report* adalah *slack resources*, dewan direksi dan komite *corporate social responsibility*. Adapun

faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, struktur kepemilikan, komite audit dan karakteristik industri.

Struktur kepemilikan menjelaskan proporsi kepemilikan saham yang terdapat pada sebuah perusahaan, serta bagaimana tindakan yang dilakukan pemilik saham tersebut (Petta & Tarigan, 2017). Pengukuran yang digunakan dalam struktur kepemilikan meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing (Nugroho, 2021). Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing.

Kepemilikan institusional adalah merupakan proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan presentase (Naufal, 2020:13). Sedangkan menurut (Singal & Putra, 2019) Kepemilikan institusional adalah kepemilikan suatu perusahaan yang sahamnya milik berbagai bentuk lembaga ataupun perusahaan lainya, baik itu didalam maupun luar negeri. Kepemilikan institusional yang besar akan meningkatkan kinerja manajemen pada perusahaan semakin ketat, maka dapat mendorong dalam pengungkapan *sustainability report*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nyoman Jagra, Edy Suajan & Desak Nyoman Sri Werastuti (2023) dan Nurleni *et al* (2017), menunjukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *sustainability report*. Penelitian tersebut berbeda dengan Ade Dwiyani & Resti Yulistia Muslim (2020) dan Setyawan *et al* (2018) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *sustainability report*.

Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif dalam pengambilan keputusan didalam perusahaan, misalnya direktur dan komisaris (Majid, 2018). Sedangkan menurut (Pasaribu, Topowijaya dan Sri, 2018) kepemilikan manajerial adalah pemilik atau pemegang saham oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan manajerial yang besar didalam perusahaan akan meningkatkan tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan lebih rendah sehingga tuntutan yang dihadapi perusahaan untuk mengungkapkan *sustainability report* jauh lebih

sedikit. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hardika (2018) dan Sellami (2019) kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *sustainability report*. Penelitian tersebut berbeda dengan Ade Dwiyani & Resti Yulistia Muslim (2020) dan Setyawan, Yuliandari & Aminah (2018) bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *sustainability report*.

Menurut Undang-undang No.25 tahun 2007 pasal 1 angka 6 kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan menurut (Laksmi, 2018) kepemilikan asing adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak asing institusional maupun individu. Perusahaan yang memiliki kontrak dengan pihak asing baik dalam kepemilikan saham, maka perusahaan tersebut akan lebih didukung dalam melakukan pengungkapan *sustainability report*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Susadi (2021) dan Yani & Saputra (2020) menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *sustainability report*. Penelitian tersebut berbeda dengan Ariani (2019) dan Amidjaya & Widagdo (2018) bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap *sustainability report*.

Komite audit adalah organ pelengkap yang diperlukan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang menjalankan fungsi pengarahan dalam penerapan manajemen perusahaan dan mengelola tugas-tugas penting terkait dengan sistem laporan keuangan yang ada pada perusahaan (Muda et al, 2017). Sedangkan menurut Putriningsih et al (2019) komite audit adalah agen yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Semakin banyak jumlah komite audit maka koordinasi komite audit akan semakin baik sehingga dapat melaksanakan pengawasan terhadap manajemen dengan lebih efektif dan diharapkan dapat mendukung peningkatan publikasi informasi sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan (Tobing, 2019). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yulia Syafitri & Yuli Ardiany (2022) dan Dizar,

Alifia & Alvionita (2019) menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *sustainability report*. Penelitian tersebut berbeda dengan Tobing (2019) dan Damayanti (2020) bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *sustainability report*.

Karakteristik industri adalah ciri khas suatu entitas usaha (Siregar, 2016). Sedangkan menurut (Wijayanti et al, 2017) Karakteristik industri adalah sifat yang mengikat pada setiap perusahaan dan mampu dilihat oleh bermacam sisi. Adapun pengukuran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan *leverage*.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan diukur dengan total aktiva, jumlah penjualan, nilai saham dan sebagainya (Widiastari & Yas, 2018). Sedangkan menurut (Sari, 2017) ukuran perusahaan yakni skala untuk melihat besar dan kecilnya perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan dapat mendorong pihak manajemen untuk mengungkapkan *sustainability report* kepada para pemegang saham serta masyarakat luas sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya. Tidak hanya perusahaan besarlah yang mampu mengungkapkan laporan keberlanjutan, perusahaan kecil pun dianggap mampu mengungkapkan laporan keberlanjutan apabila jika dianggap mampu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tobing & Ruserlistyani (2019) dan Barung (2018) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *sustainability report*. Penelitian tersebut berbeda dengan Liana (2019) dan Susana & Dewi (2019) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *sustainability report*.

*Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana asset suatu perusahaan dibiayai oleh hutang (Meutia & Kristanti, 2019). Sedangkan menurut (Brigham & Houston, 2019) *leverage* adalah bagaimana perusahaan menggunakan modal pinjaman yang berupa hutang sebagai sumber pendanaan untuk penambahan asset perusahaan dan untuk mendapatkan atau meningkatkan laba dari modal pinjaman tersebut. *Leverage* merupakan tingkat utang perusahaan maka semakin tinggi rasio *leverage* semakin rendah kemampuan perusahaan untuk

melaksanakan kewajibannya kepada kreditor hal ini dapat mengganggu pemenuhan kewajiban pengungkapan *sustainability report*. Bagaimanapun kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, sosial dan masyarakat juga memerlukan pengorbanan keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Pramudiati (2019) dan Aniktia & Khafid (2015) menemukan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap *sustainability report*. Penelitian tersebut berbeda dengan Meutia (2019) dan Hana Septiani, Mukhzarudfa & Yudi (2018) bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *sustainability report*.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “**Pengaruh Struktur Kepemilikan, Komite Audit Dan Karakteristik Industri Terhadap Sustainability report (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ45 Periode Agustus 2023- Januari 2024 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019- 2022)**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *sustainability report*?
2. Bagaimana Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *sustainability report*?
3. Bagaimana Kepemilikan asing berpengaruh terhadap *sustainability report*?
4. Bagaimana Komite audit berpengaruh terhadap *sustainability report*?
5. Bagaimana Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *sustainability report*?
6. Bagaimana *Leverage* berpengaruh terhadap *sustainability report*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menghasilkan bukti atau fakta empiris yang dapat menjelaskan tentang :

1. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *sustainability report*.
2. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *sustainability report*.

3. Pengaruh kepemilikan asing terhadap *sustainability report*.
4. Pengaruh komite audit terhadap *sustainability report*.
5. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *sustainability report*.
6. Pengaruh *leverage* terhadap *sustainability report*.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam dua sudut pandang, yaitu :

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam ilmu akuntansi dan pengembangan teori, terutama berkaitan dengan struktur kepemilikan, komite audit, dan karakteristik industri berpengaruh secara layak terhadap *sustainability report*.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan *sustainability report* di perusahaan.

###### **b. Bagi Investor**

Peneitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan bacaan serta dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut bagi pihak lain-lain.